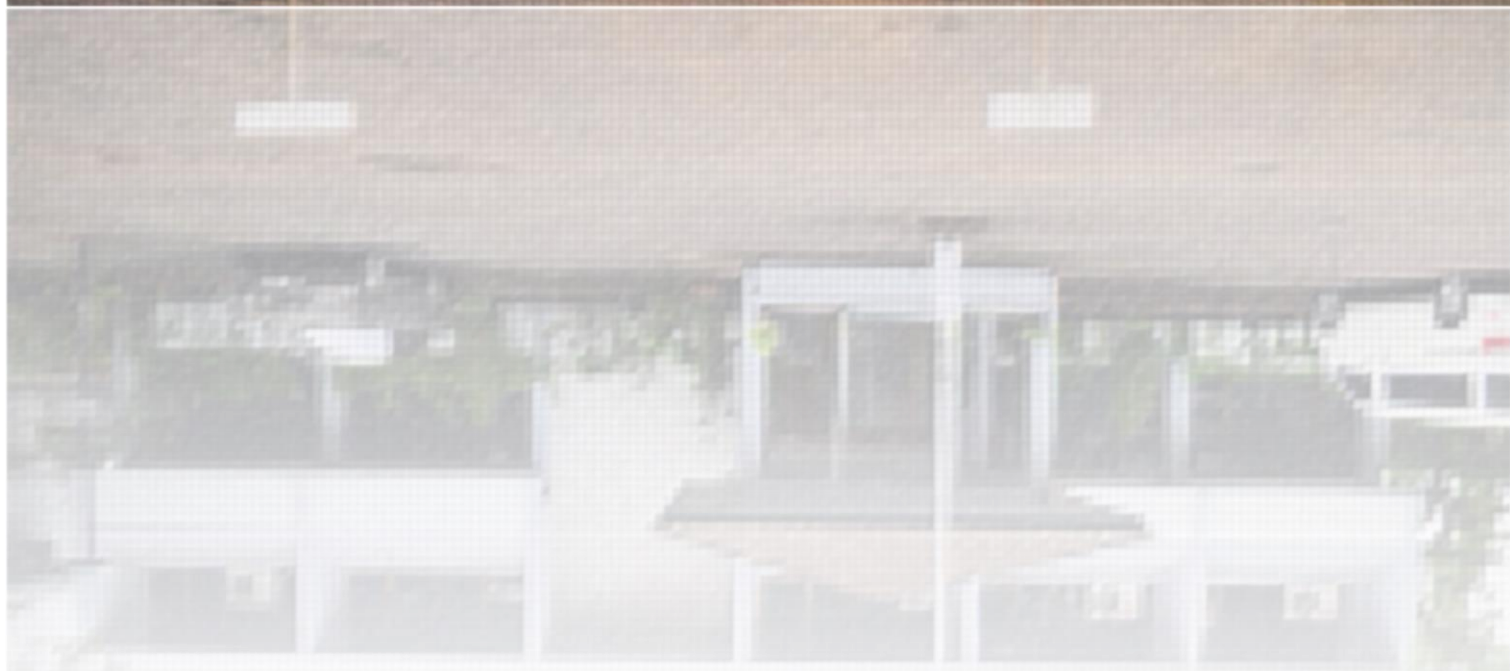


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
(RKT BP3AKB)
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**



BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT

Web: bp3akbjabarprov.go.id

JL. SOEKARNO HATTA 458, BANDUNG-40266 TLP./Fax. 022-7513581

EMAIL : bp3apkkb@jabarprov.go.id, bp3akbjabar.renprog@yahoo.com

DESEMBER 2015

KATA PENGANTAR

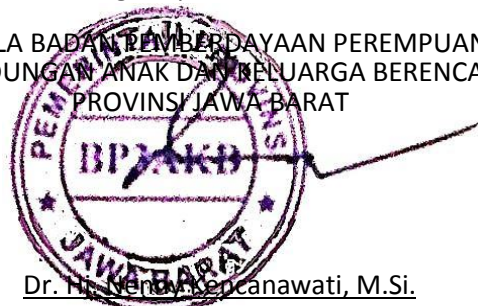
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerahNya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Penyusunan RKT ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

RKT BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini memuat uraian rencana program dan kegiatan BP3AKB dalam tahun 2016. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja BP3APKKB dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Jawa Barat.

Harapan kami semoga RKT BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Jawa Barat.

Bandung, September 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H. Nendy Kencanaawati, M.Si.
NIP. 19570114 198503 2002

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	5
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018	5
2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2.1.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Program	6
2.2. Rencana Kerja Tahun 2016	9
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran	9
2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran	11
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN ..	16
Lampiran 1. Formulir Rencana Strategik Tahun 2013-2018	17
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	20
Lampiran 3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 ...	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT-OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat dengan RKT BP3AKB adalah dokumen perencanaan BP3AKB untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKT BP3AKB Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, RKT dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RKT dan Renstra BKKBN Nasional serta dengan melakukan konfirmasi dengan Renstra kabupaten/kota.

Selanjutnya RKT BP3AKB Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional kedalam RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT BP3AKB adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua kalinya Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2014 adalah :

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

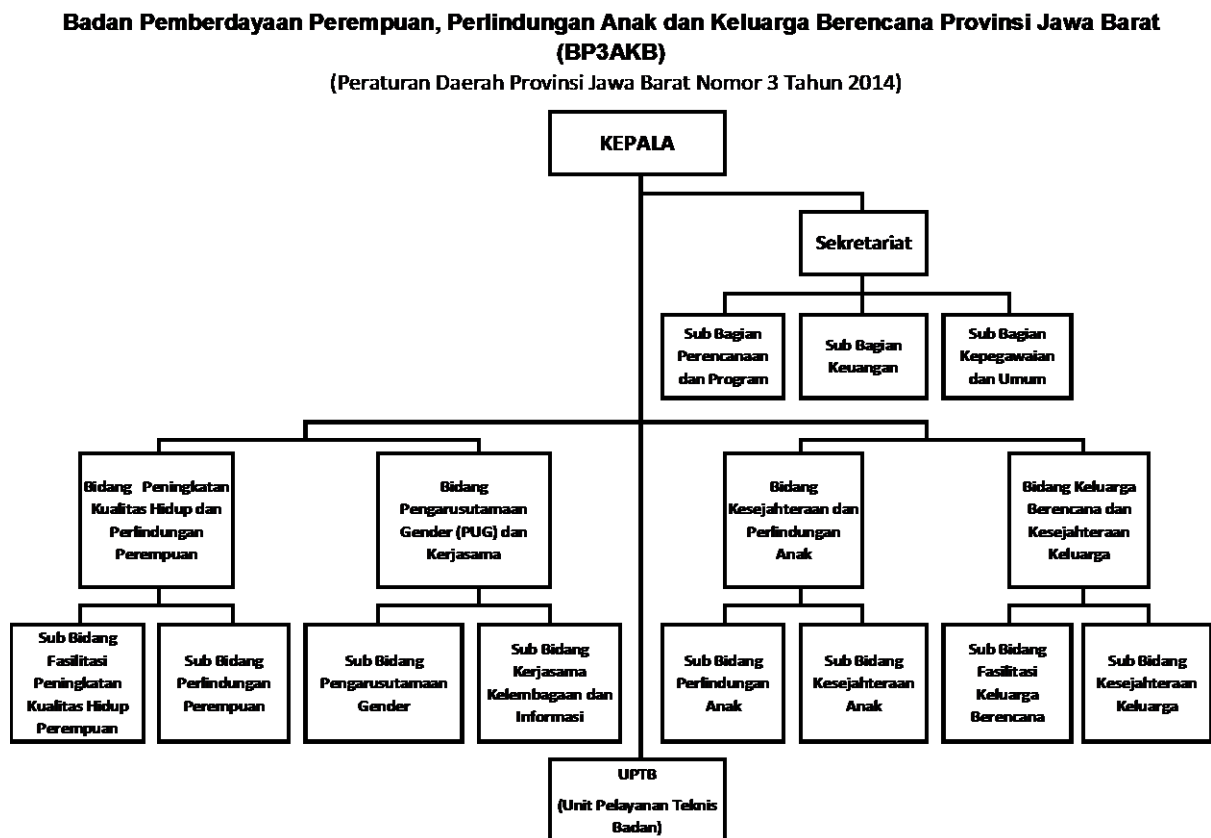
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BP3AKB Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- 3) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- 4) penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu Lembaga Teknis baru adalah sebagai berikut :



Jumlah personil yang ditugaskan pada BP3AKB yang pada awal berdirinya bernama BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) tanggal 9 Januari 2009, berjumlah 90 orang yang berasal dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2010 menjadi 93 orang dan akhir tahun 2010, personil bertambah menjadi 95 orang. Karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi/promosi, pada akhir tahun 2011, pegawai berkurang menjadi 86 orang. Pada akhir tahun 2012 berkurang lagi menjadi hanya 78 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 menjadi 76 orang.

BAB II

RENCANA STRATEJIK

2.1. Rencana Strategik Tahun 2014-2018

2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan

BP3AKB menetapkan visi :

“ Terwujudnya Keluarga Jawa Barat Yang Mandiri Sehat dan Sejahtera”.

Sebagai penjabaran visi tersebut, Misi BP3AKB tahun 2014 - 2018, yaitu:

1. Meningkatkan Pelaksanaan dan Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Perempuan, serta Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Fasilitasi Pelayanan Program KB, Ketahanan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan
4. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Kelembagaan.

Secara rinci, setiap Misi BP3AKB menetapkan tujuan berikut.

Tujuan Misi 1 :

- 1) Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Jawa Barat, serta memperkuat kelembagaan dan kerjasama PUG antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tujuan Misi 2 :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melaksanakan fasilitasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan fasilitasi tumbuh kembang anak untuk membangun anak Jawa Barat yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, sejahtera, terlindungi serta aktif berpartisipasi.

Tujuan Misi 3 :

- 1) Pengendalian kependudukan dan meningkatnya ketahanan keluarga .

Tujuan Misi 4 :

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

2.1.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Program**Sasaran Misi 1 :**

Sasaran Strategis:

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran antara :

- Meningkatkan upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender
- Meningkatkan upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
- Meningkatkan kerjasama PUG antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Meningkatkan sistem informasi dan kerjasama melalui Web SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

Sasaran Misi 2 :

Sasaran strategis :

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran antara :

- Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, politik dan meningkatnya produktifitas ekonomi perempuan
- Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan / eksploitasi perempuan dan anak
- Penguatan, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan timbulnya permasalahan tumbuh kembang dan perlindungan anak terhadap berbagai tindakan atau kejadian penelantaran dan perlakuan salah serta dari dampak negatif arus Globalisasi
- Fasilitasi pengembangan bakat, minat, potensi dan kemandirian anak termasuk mendengar suara anak, serta revitalisasi penanaman nilai-nilai luhur yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak
- Optimalisasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan jaringan lokal nasional, regional dan internasional.

Sasaran Misi 3 :

Sasaran strategis :

Menurunkan angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga

Sasaran antara :

- Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru, termasuk didalamnya penurunan tingkat drop out peserta KB, meningkatnya peserta KB Mandiri, serta meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB
- Tersedianya sumber daya pengelola kelompok remaja terlatih dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan

- Penurunan jumlah keluarga PraSejahtera dan Tersedianya Neraca Kependudukan.

Sasaran Misi 4 :

- Memaksimalkan sumber daya
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program

Indikator Sasaran secara rinci sebagai berikut.

Indikator Sasaran Misi 1 “Meningkatkan Pelaksanaan dan Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)”

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 68.00 poin
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75.00 poin
- 3) Penghargaan Presiden RI “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) 5 buah
- 4) Jumlah Produk hukum PUG 1 buah.

Indikator Sasaran Misi 2 “Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Perempuan, serta Fasilitas Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak”

- 1) Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%
- 2) Pemberdayaan Perempuan melalui Program PEKKA 599 Kelompok
- 3) Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS 265 Kelompok
- 4) Jumlah Kota Layak Anak (KLA) 157 Desa/Kelurahan.

Indikator Sasaran Misi 3 “Fasilitas Pelayanan Program KB, Ketahanan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan

- 1) Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 67.10%
- 2) Prosentase Peserta KB Mandiri 51.60%
- 3) Prosentase Peserta KB Pria 3.40%
- 4) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) 21.32%
- 5) Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 1.263.116 KK.

Indikator Sasaran Misi 4 “Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Kelembagaan”

- 1) Dokumen Perencanaan Tahun 2014-2018
- 2) Laporan Tahunan : LAKIP, LPPD, LKPI
- 3) Laporan Evaluasi Triwulanan : I, II, III, IV.

Selanjutnya untuk mencapai indikator kinerja tersebut di atas, dilaksanakan dengan menjabarkannya dalam APBD Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan Program-program berikut :

Program-program

Program pelaksanaan Misi 1 :

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program pelaksanaan Misi 2 :

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program pelaksanaan Misi 3 :

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Keluarga Berencana

Program pelaksanaan Misi 4 : Bidang Otonomi Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.2. Rencana Kerja Tahun 2016

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran Misi 1 :

Sasaran Strategis:

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran antara :

- Meningkatkan upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender
- Meningkatkan upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
- Meningkatkan kerjasama PUG antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Meningkatkan sistem informasi dan kerjasama melalui Web SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

Sasaran Misi 2 :

Sasaran strategis :

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran antara :

- Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, politik dan meningkatnya produktifitas ekonomi perempuan
- Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan / eksploitasi perempuan dan anak
- Penguatan, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan timbulnya permasalahan tumbuh kembang dan perlindungan anak terhadap berbagai tindakan atau kejadian penelantaran dan perlakuan salah serta dari dampak negatif arus Globalisasi
- Fasilitasi pengembangan bakat, minat, potensi dan kemandirian anak termasuk mendengar suara anak, serta revitalisasi penanaman nilai-nilai luhur yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak
- Optimalisasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan jaringan lokal nasional, regional dan internasional.

Sasaran Misi 3 :

Sasaran strategis :

Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga

Sasaran antara :

- Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru, termasuk didalamnya penurunan tingkat drop out peserta KB, meningkatnya peserta KB Mandiri, serta meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB
- Tersedianya sumber daya pengelola kelompok remaja terlatih dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

- Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan
- Penurunan jumlah keluarga PraSejahtera dan Tersedianya Neraca Kependudukan.

Sasaran Misi 4 :

- Memaksimalkan sumber daya
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program

Indikator Sasaran Tahun 2016 secara rinci sebagai berikut.

Indikator Sasaran Misi 1 :

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,68 persen
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68,50 poin
- 3) Penghargaan Presiden RI “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) 1 buah

Indikator Sasaran Misi 2 :

- 1) Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 10%
- 2) Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen 20 persen
- 3) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 458 Desa/Kelurahan (bertambah 10 Desa/Kelurahan di Tahun 2016).

Indikator Sasaran Misi 3 (Ketahanan keluarga dan KB) :

- 1) Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 75%
- 2) Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP) 20%
- 3) Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 3,60persen

Indikator Sasaran Misi 4 :

- 1) Dokumen Perencanaan Tahun 2016 berupa RKT 2016 dan RENJA 2016
- 2) Laporan Tahunan 2015 berupa : LAKIP Tahun 2016, LKPJ Tahun 2016, LPPD Tahun 2016
- 3) Laporan Evaluasi Triwulanan : Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2016.

Diantara indikator sasaran misi BP3AKB Provinsi Jawa Barat, sebagian besar merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3AKB Provinsi Jawa Barat yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015. Indikator Kinerja Utama beserta target capaian indikator Tahun 2016 adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target Capaian Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73 poin
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.68%
		Penghargaan Presiden Anugerah Parahita Ekapraya	9 buah
2	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan	100%
		Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA /Jumlah Kelompok PEKKA	545 kelompok
		Jumlah Kota Layak Anak (KLA)	38 desa/kel
3	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	75%
		Prosentase Peserta KB Pria	3 %
		Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	3.60%

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Program yang dilaksanakan BP3AKB Tahun 2016 adalah :

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rincian Rencana Program, kegiatan dan rencana anggaran tahun 2016 seperti pada Tabel berikut.

Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahun 2016

Nomor Kode			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp.)
1	29		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		712,500,000
1	29	01	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB	Bandung Jawa Barat	712,500,000
			- Terwujudnya kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kab/kota		
2	38		Program Penataan Administrasi Kependudukan		1,032,525,000
2	38	01	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	Jawa Barat	1,032,525,000
			- Terpadunya kebijakan pengendalian kependudukan dan KB di Jawa Barat dan Meningkatnya wawasan TPD tentang Program Kependudukan dan KB		
3	43		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		2,995,000,000
3	43	01	Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawa Barat	Kota Bandung	810,000,000
			- Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan		
4	43	02	Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	di Jawa Barat	900,000,000
			- Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender - Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan		
5	43	03	Pengarusutamaan Gender (PUG)-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat	Jawa Barat	475,000,000
			- Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		
			- Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan		
6	43	04	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	27 Kab/Kota	810,000,000
			- Terinformasikannya SIGA di 27 kabupaten/kota		
7	44	01	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Provinsi Jawa Barat	665,000,000
			- Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak		
8	44	02	Peningkatan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
			- Meningkatkan kreativitas dan pemenuhan hak partisipasi anak di Jawa Barat		
9	44	03	Pengembangan Kota Layak Anak	Jawa Barat	800,000,000
			- Terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak anak		
10	44	04	Perlindungan Anak	Jawa barat	800,000,000
			Meningkatnya upaya Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (Trafficking)		
11	44	05	Peringatan Hari Nasional Perempuan	Jawa Barat	855,000,000
			- Meningkatkan Penghargaan Terhadap Perempuan		
12	44	06	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)	Jawa Barat dan Luar Provinsi	1,870,000,000

Nomor Kode			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp.)
4	44		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		15,422,500,000
			- Meningkatkan upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga serta Perdagangan Perempuan dan anak (trafficking)		
13	44	07	Perempuan dan Kemandirian Berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan /PPEP (PEKKA)	Jawa Barat	712,500,000
			- Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian usaha		
14	44	08	Capacity Building bagi anggota KPPI Jawa Barat (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Jawa Barat	380,000,000
			- Meningkatkan Peranan Perempuan di Bidang Politik		
15	44	09	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jawa Barat	760,000,000
			- Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan		
16	44	10	Jambore Forum Anak	Jawa Barat	1,300,000,000
			- Meningkatkan kreativitas, jiwa korsa, dan motivasi organisasi pengurus Forum Anak provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat		
17	44	11	Women Self Defense/Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat	Jawa Barat	1,500,000,000
			- Meningkatkan kesadaran dan pertahanan diri bagi perempuan		
18	44	12	Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1,000,000,000
			- Tercapainya pemberdayaan perempuan istri PNS		
19	44	13	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Jawa Barat	230,000,000
			- Meningkatkan Pemberdayaah Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)		
20	44	14	Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat	Jawa Barat	500,000,000
			- Meningkatkan Peranan Perempuan Bidang Politik		
21	44	15	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jawa Barat	250,000,000
			- Tercapainya pemberdayaan perempuan serta pembinaan di bidang organisasi perempuan		
22	44	16	Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1,624,902,000
			- Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional P2TP2A Provinsi Jawa Barat dalam mendukung tugas dan fungsinya		
23	44	17	P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	Jawa Barat	1,175,098,000
			- Meningkatkan Upaya Perempuan dan Anak		
5	45		Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		10,254,000,000
24	45	01	Ketahanan Keluarga	Jawa Barat	750,000,000.00
			- Terwujudnya Keluarga Sejahtera		
25	45	02	Motivator Ketahanan Keluarga (MOTOKAR)	Jawa Barat	9,504,000,000
			- Mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya		

Nomor Kode			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp.)
4	44		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		15,422,500,000
6	46		PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA		1,634,000,000
26	46	01	Peningkatan kesertaan ber-KB	Provinsi Jawa Barat	1,634,000,000
			- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program KB		
7	47		Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)		900,000,000
27	47	01	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Provinsi Jawa Barat	900,000,000
			- Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan di Provinsi Jawa Barat		
8	58		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur		237,500,000
28	58	01	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3AKB	Jawa Barat	237,500,000
			- Meningkatkan Kinerja Pegawai BP3AKB Provinsi Jawa Barat		
9	59		Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur		638,000,000
29	59	01	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BP3AKB	Provinsi Jawa Barat	638,000,000
			- Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur BP3AKB Provinsi Jawa Barat		
10	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5,018,520,000
30	60	01	Penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bandung	3,161,070,000
			- Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor BP3AKB		
31	60	02	Iklan layanan Masyarakat BP3AKB	Bandung	1,857,450,000
			- Terlaksananya informasi layanan masyarakat melalui media elektronik		
11	61		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2,050,200,000
32	61	01	Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP3AKB	Bandung	2,050,200,000
			- Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah		
12	62		Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparat		1,733,501,000
33	62	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BP3AKB	Bandung	1,733,501,000
			- Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kantor BP3AKB Prov Jawa Barat		
13	65		Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah		100,000,000
34	65	01	Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat	Bandung	100,000,000
			- Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel		
14	66		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100,000,000
35	66	01	Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan internal BP3AKB	Bandung	100,000,000
			- Tersajinya data dan informasi Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan BP3APKKB		
JUMLAH					42,828,246,000

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 difokuskan pada pencapaian sasaran berbagai indikator sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat 2016, sasaran MDGs, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran, dijabarkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana sebagai pendukung pencapaian pembangunan Jawa Barat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan yaitu aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai fasilitasi untuk mencapai sinergitas program pemberdayaan perempuan dan anak yang berlangsung di Jawa Barat.

Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya program dan berbagai kegiatan ini adalah “diperolehnya peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai keluarga Jawa Barat yang mandiri, sehat dan sejahtera”.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RKT BP3AKB Tahun 2016 ini adalah :

- 1) Seluruh aparat BP3AKB Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2016
- 2) Sangat diharapkan konsistensi para pengguna mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta selanjutnya pada tahap implementasi, agar visi dan misi BP3AKB Provinsi Jawa Barat dapat dicapai secara bertahap
- 3) RKT Tahun 2016 ini merupakan acuan dalam operasionalisasi kegiatan institusi untuk kurun waktu tahun 2016, dalam pelaksanaannya diharapkan adanya saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya guna hasil program dan kegiatan di waktu mendatang, serta dalam rangka peningkatan profesionalisme institusi BP3AKB Provinsi Jawa Barat
- 4) RKT Tahun 2016 ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya dan langkah kita. Amiin.

Bandung, September 2015

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT**


Dr. Hj. Nenny Kencanawati, M.Si.
NIP. 19570414198503 2002